

BB

FORUM

PILPRES DAN PROGRAM PEMERINTAH MENDATANG

**PROGRAM KERJA PEMERINTAH
ANTARA HARAPAN DAN TANTANGAN**

**KINERJA DAN PROGRAM PEMBANGUNAN PEMERINTAH S. B. Y. :
ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN**

**PROGRAM KERJA 100 HARI KABINET INDONESIA BERSATU II :
DUKUNGAN DAN HAMBATAN**

**SOCIAL NETWORKING SITES, KOMUNIKASI POLITIK
DAN AKURASI PREDIKSI DALAM PEMILIHAN PRESIDEN
DI INDONESIA**

**PROGRAM CAPRES/CAWAPRES DALAM PENGUATAN
PEMBANGUNAN EKONOMI RAKYAT**

**MENAKAR GOOD GOVERNANCE
DI ERA PEMERINTAHAN SBY-BOEDIONO 2009-2014**

**PRO-KONTRA SUSUNAN TIM EKONOMI
KABINET INDONESIA BERSATU TAHAP II**

REFORMASI BIROKRASI MASIH BELUM SELESAI

CATATAN DI PELAKSANAAN PILPRES 2009

KOMUNIKASI POLITIK STRATEGIS

**POLITIK TUBUH PEREMPUAN:
KEBIJAKAN DAN KONSTRUKSI MEDIA MASSA**

**DAMPAK BELANJA PEMILU LEGISLATIF 2009
TERHADAP SEKTOR RIIL**



DAFTAR ISI :

Pengantar	i
Wiwik Widayati Program Kerja Pemerintah Antara Harapan Dan Tantangan	1
Purwoko Kinerja Dan Program Pembangunan Pemerintah S.B.Y : Antara Harapan Dan Kenyataan	10
Rina Martini Program Kerja 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II : Dukungan Dan Hambatan	19
Andi Wijayanto Social Networking Sites, Komunikasi Politik dan Akurasi Prediksi dalam Pemilihan Presiden di Indonesia	24
Reni Shinta Dewi Program Capres/Cawapres Dalam Penguatan Pembangunan Ekonomi Rakyat	31
Hermini Susiatiningsih Menakar Good Governance Di Era Pemerintahan SBY - Boediono 2009 - 2014	36
Sulistyowati Pro-Kontra Susunan Tim Ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu Tahap II	42
Nina Widowati Reformasi Birokrasi Masih Belum Selesai	47
Fitriyah Catatan Di Pelaksanaan Pilpres 2009	54
Joyo Nur Suryanto Gono Komunikasi Politik Strategis	62
Hapsari Dwiningtyas Sulistyani Politik Tubuh Perempuan : Kebijakan Dan Konstruksi Media Massa	66
Ari Pradhanawati dan Reni Shinta Dewi Dampak Belanja Pemilu Legislatif 2009 Terhadap Sektor Riil	71

Penerbit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro - Terbit Pertama kali bulan Februari 1972 ; **Penanggung Jawab** : Drs. Warsito, SU - Dra. Sri Widowati H, MS - Drs. Agus Hermani. DS, MM Drs. Teguh Yuwono, M. Pol. Admin ; **Ketua Penyunting** : Drs. Suwanto Adhi, SU ; **Sekretaris Penyunting** : Agus Naryoso, S.Sos ; **Penyunting Pelaksana** : Dra. Hartuti. P, MPA - Drs. Tri Cahyo Utomo, MA - Gr. Turnomo Rahardjo - Dra. Rodhiyah, SU ; **Penyunting Ahli** : Prof. Dr. Y. Warella, MPA (Undip) - Prof. Dr. Sudharto PH, MES (Undip) - Dr. Ari Pradhanawati, MS (Undip) - Prof. Dr. Roger Page (USA) - Dr. Peter Suwarno (USA) - Dr. Dedy Nur Hidayat (UI) ; **Tata Usaha** : Tri Wardoyo, S.E - Staf Tata Usaha Fisip - Undip;

Alamat :

MPIIS Forum Fakultas Ilmu dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Imam Bardjo SH. No. 1 Semarang Telp. (024) 8442532, 8414513
Fax. (024) 8449629 mad : mpiis - forum@usa.net

Sumbangan Tulisan :

Redaksi menerima sumbangan tulisan/foto yang relevan dengan tema atau topik pada setiap penerbitan, Setiap foto haruslah disertai dengan foto copy identitas yang jelas. Setiap artikel yang dikirimkan menjadi hak sepenuhnya dari redaksi untuk mengedit dan menampilkannya

PENGANTAR REDAKSI

Pembaca yang budiman,

Hajatan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan pada tanggal 8 juli 2009 yang lalu menjadi agenda penting bangsa Indonesia yang monumental.

Sege nap element bangsa secara serentak berpartisipasi di dalamnya ikut mengawal proses pemungutan hingga penghitungan suara. Tidak ketinggalan pula perguruan tinggi ikut mendorong berkembangnya wacana intelektual di bidang politik, demokrasi, hukum dan konstitusi melalui serangkaian penerbitan. Salah satunya lewat Majalah Pengembangan Ilmu – Ilmu Sosial “FORUM” yang telah memasuki volume 38 no 1 Februari 2010 dengan tema sentral “PILPRES dan PROGRAM PEMERINTAH MENDATANG”.

Tema ini hadir di tengah – tengah pembaca untuk memberikan informasi dan sekaligus sebagai pelepas kerinduan para pembacanya. Dalam kesempatan ini berbagai topik menarik dan terkini tampil dalam rangkuman dan penulisan artikel yang dikemas secara baik, yang kesemuanya tetap terkait dalam jalinan dan nuansa Pilpres dan Program Pemerintah mendatang. Rubrik didalamnya pada garis besarnya meliputi beberapa artikel, catatan maupun evaluasi pelaksanaan Pilpres 2009, maupun berbagai program kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah, panjang, antara harapan dan tantangan baik di bidang reformasi birokrasi, ekonomi maupun sosial pada umumnya.

Muatan kali ini tidak sekedar diharapkan memperkaya khasanah pengetahuan dan wawasan pembaca, lebih dari itu adalah menginspirasi setiap pembaca agar sadar berpolitik, berdemokrasi dan berpemerintahan seutuhnya dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

Itulah sekilas pengantar dari Redaksi. Sebelumnya redaksi senantiasa meminta kepada para pembaca untuk memberikan saran, kritik yang bersifat membangun demi kelangsungan majalah FORUM. Kita tunggu, sekian dan selamat membaca.

Salam Redaksi

PROGRAM KERJA 100 HARI KABINET INDONESIA BERSATU II : DUKUNGAN DAN HAMBATAN

Oleh : Rina Martini

Abstract

One hundred days programme of Kabinet Indonesia Bersatu II comprises of many work programmes related to improvement in law, economy, social, politics, food-safety, local autonomy, infrastructure sectors, including problems of weather change and environment, terrorism, and disaster management. As a planning document, those programmes, not only a set of utopian programmes, but also concrete ones. However, there are supportive and obstacle factors both internal and externally. Therefore, it needs to have a strategic and accurate steps to employ the existing supportive factors and facing the obstacles without any reserve.

Key words : work programme, support, obstacle

PENDAHULUAN

Usai sudah pesta demokrasi untuk memilih presiden dan wakil presiden bagi bangsa Indonesia. Oleh KPU, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono ditetapkan sebagai pemenang pemilu dengan perolehan suara 60% lebih. Setelah dilantik menjadi presiden dan wakil presiden, seperti pada umumnya sebuah pemerintahan baru, mereka melantik para pembantu-pembantunya (menteri-menterinya) yang diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu (Jilid II). Susunan Kabinet ini terdiri dari 34 menteri, dengan komposisi; tiga menteri koordinator; satu menteri sekretaris negara; 20 menteri memimpin departemen; dan 10 menteri negara non-departemen. Kabinet ini diharapkan berisi orang-orang yang kompeten, bersih, jujur, dan penuh dedikasi, baik dari kalangan partai maupun nonpartai. Sehingga pakta integritas dan kontrak kerja akan menjadi bagian yang sangat penting bagi pelaksanaan kabinet ini untuk masa yang akan datang.

Terlepas dari adanya pihak yang setuju dan tidak setuju terhadap susunan kabinet ini, sehari setelah dilantik para menteri diharuskan menyusun program kerja 100 hari. Mengapa ada pembatasan waktu 100 hari? Karena 100 hari adalah waktu yang akan menentukan keberhasilan program kerja satu tahun pertama. Keberhasilan pelaksanaan program kerja selama satu tahun pertama, akan menentukan keberhasilan program kerja lima tahun ke depan. Rencana atau program kerja pemerintah selama lima tahun ke depan adalah penjabaran dari visi dan misi yang telah disampaikan selama rangkaian kampanye SBY-Boediono pada Pemilu 2009. Intinya "yang sudah baik dilanjutkan dan yang belum baik diperbaiki" (<http://www.suarapembaruan.com/News/2009/>

10/17/index.html).

Di sini, SBY tinggal berperan sebagai dirigen pada sebuah orkestra. Dialah yang menentukan lagu apa yang akan dinyanyikan dan membuat partitur sebagai landasannya. Setiap anggota kabinet dipastikan akan bermain (bekerja) sesuai partitur yang ada, dan memainkan alat yang dikuasainya dengan teknik tinggi. Bisa diibaratkan, sebuah simponi sedang dimainkan. Kebersamaan, keterpaduan, dan keharmonisan, diharapkan akan terwujud.

Dari uraian di atas, maka kita bisa merumuskan beberapa persoalan penting yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu: apa saja program kerja 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II, terutama program-program pilihannya itu? Dukungan apa saja yang bisa dimanfaatkan? Serta hambatan apa yang harus dihadapi untuk mewujudkan program-program itu?

PEMBAHASAN

Program kerja 100 hari

Program kerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian dan sebagainya) yang akan dijalankan. Dan Kabinet Indonesia Bersatu II telah menyusun program kerja untuk lima tahun ke depan adalah sebanyak 45 (empat puluh lima) program. Dari 45 program itu, oleh presiden SBY dipilih 15 (lima belas) program yang akan diutamakan untuk divujudkan selama 100 hari kepemimpinannya. Kelima belas program pilihan itu adalah (<http://www.media-indonesia.com>):

1. Pemberantasan mafia hukum

Yaitu dengan langkah konkrit memberantas mafia hukum dan menyerukan kepada rakyat untuk melaporkan segala bentuk mafia hukum melalui PO BOX 9949 Jakarta 10000. Mafia hukum yang dimaksudkan adalah makelar kasus, suap menyuap, pemerasan, jual beli perkara, mengancam saksi, mengancam pihak-pihak lain, pungutan-pungutan yang tidak semestinya, dan sebagainya.

2. Revitalisasi industri pertahanan

Yaitu dengan membuat *masterplan/roadmap* untuk revitalisasi industri pertahanan. Termasuk di dalamnya apa yang akan diproduksi, terutama untuk memenuhi keperluan dalam negeri dan luar negeri, terutama kontrak-kontrak yang sedang berjalan.

3. Penanggulangan terorisme

Yaitu dengan jalan mencegah dan menangkal tindak pidana terorisme, serta mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjadi bagian dalam upaya pemberantasan teroris melalui jalur pendidikan, kegiatan di masyarakat, dan lain sebagainya. Dalam 100 hari peningkatan kapasitas, restrukturisasi, dan penetapan langkah nyata harus selesai dirumuskan.

4. Meningkatkan daya listrik di seluruh Indonesia

Dalam 100 hari harus ada kepastian langkah-langkah tentang peningkatan kapasitas listrik untuk mengimbangi dan memenuhi kebutuhan industri komersial, rumah tangga, transportasi, dll. Serta memetakan provinsi demi provinsi untuk mendata mana saja yang kekurangan listrik, dan mendayagunakan sumber-sumber lain di luar batubara.

5. Meningkatkan produksi dan ketahanan pangan

Dilakukan dengan jalan merumuskan kembali rencana induk, termasuk tahapan sampai dengan tahun 2014 dan terutama untuk mencapai pemanfaatan komoditas yang belum dicapai lima tahun sebelumnya yaitu daging sapi, kedelai, dan gula. Dan memperbaiki faktor-faktor pendukung seperti misalnya irigasi, pupuk, subsidi khusus bagi petani, hasil *research*, dan sebagainya.

6. Revitalisasi pabrik pupuk dan gula

Diwujudkan dengan membuat cetak biru dan program revitalisasi industri pupuk dan gula dalam 100 hari harus jadi dikaitkan dengan pertumbuhan pertanian.

7. Pembinaan penggunaan tanah dan tata ruang

Dengan membuat solusi pemecahan kompleksitas masalah penggunaan tanah dan tata ruang dengan pemerintah daerah, karena banyak keluhan dari daerah-daerah tentang tumpang tindih dan tabrakan penggunaan lahan berikut tata ruangnya. Selain itu termasuk di dalamnya merumuskan mekanisme sinkronisasi peraturan perundang-undangnya.

8. Membangun infrastruktur

Dengan merumuskan cetak biru pembangunan infrastruktur untuk lima tahun mendatang beserta pendanaannya, dimana pemerintah akan bekerjasama dengan pemerintah daerah dan dunia usaha, juga mewujudkan skema *public private partnership*.

9. Meningkatkan kewirausahaan dan pengembangan UMKM melalui pengucuran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Dengan mengucurkan dana Rp 2 triliun untuk KUR, serta meningkatkan kewirausahaan melalui balai-balai latihan untuk mencetak tenaga-tenaga trampil di tingkat kabupaten dan kota, perbaikan regulasi dan kelembagaan, dengan membangun sinergi antara bank-bank negara dan swasta dengan lembaga penjamin lain. Dengan demikian UKM terus bangkit dan penghasilan keluarga bisa meningkat.

10. Mobilisasi sumber pembiayaan di luar APBN/APBD

Dengan memobilisasi sumber pembiayaan di luar APBN/APBD yang akan menanamkan modalnya baik dari dalam maupun luar negeri. Sehingga beberapa program kerja bisa dibiayai.

11. Mengelola perubahan iklim dan lingkungan hidup

Dengan memastikan bahwa pemeliharaan hutan Indonesia betul-betul terlaksana dengan baik. Pemberantasan pembalakan liar, mencegah kebakaran dan pembakaran hutan, dan memelihara hutan-hutan lindung. Juga menjaga fungsi hutan dan terumbu karang. Serta mewujudkan *action plan 2020, energy mix 2020, dan action plan 2050* untuk mengelola perubahan iklim dan pemanasan global.

12. Reformasi kesehatan

Dengan mengubah paradigma dari sekedar berobat gratis menjadi sehat gratis bagi masyarakat yang tidak mampu, miskin, dan sangat miskin. Oleh karena itu fungsi dan peran lembaga-lembaga kesehatan masyarakat akan ditingkatkan.

13. Reformasi pendidikan dengan

menyambungkan atau mencegah *mismatch* antara SDM yang dihasilkan oleh Lembaga Pendidikan dan Lembaga Pelatihan dengan keperluan pasar tenaga kerja.

Dengan merumuskan mekanisme, *policy*, *action plan* yang disebut dengan tripartit yaitu lembaga pendidikan, pasar tenaga kerja, dan pemerintah, untuk menyambungkan lulusan lembaga pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

14. Peningkatan kesiagaan penanggulangan bencana

Dengan membentuk *standby force*, yang merupakan kelanjutan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang setiap saat bisa dikerahkan kemanapun di seluruh wilayah Indonesia. *Standart Operasional Prosedure (SOP)*, dalam 100 hari harus siap.

15. Sinergi pusat dan daerah

Yaitu dengan sinkronisasi peraturan/kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama untuk pembangunan ekonomi, kesejahteraan rakyat, hukum, dan keamanan. Seluruh program pilihan di atas harus dicapai karena tahap ini adalah tahap pertama untuk mensukseskan program-program kerja tahun pertama.

Dari program-program kerja pilihan yang akan diwujudkan dalam 100 hari masa kepemimpinan SBY tersebut, kita bisa menilai bahwa langkah-langkah yang akan diambil sudah bersifat konkrit, artinya tidak berada diawang-awang. Semua langkah tersebut bisa dilaksanakan dan diwujudkan dalam jangka waktu 100 hari asalkan disertai kerja keras, komitmen, dan dedikasi yang tinggi dari para menteri untuk rakyat Indonesia. Tetapi langkah untuk mewujudkan program-program itu tidaklah gampang. Terutama adalah pada masalah hukum dan finansial. Pada dua masalah ini, pemerintahan SBY akan terpotong menghadapinya. Karena banyak sekali kasus-kasus hukum dan finansial yang terbengkalai karena ketidakmampuan dan penyelewengan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum/pengadilan. Jelas, bahwa kendala, hambatan, dan hambatan, menghadang di depan mata. Meskipun ada juga dukungan yang harus dimanfaatkan oleh Kabinet Indonesia Bersatu II dalam memperlancar dan mendukung langkah-langkahnya. Dukungan dan hambatan yang dihadapi Kabinet Indonesia Bersatu II, adalah sebagai berikut :

Faktor-faktor Dukungan yang harus dimanfaatkan

Dukungan yang harus dimanfaatkan oleh Kabinet Indonesia Bersatu II dalam mewujudkan program kerja yang sudah disusun, antara lain adalah :

1. Pemerintahan SBY-Boediono didukung oleh 60% lebih rakyat Indonesia. Dukungan mayoritas rakyat ini harus betul-betul dimanfaatkan karena presiden SBY sudah menggengam legitimasi rakyat, yang belum pernah dialami oleh presiden-presiden sebelumnya. Dengan dukungan 60% lebih rakyat Indonesia, langkah-langkah yang dijalankan akan terasa ringan. Dengan langkah yang ringan maka laju perjalanan pencapaian target 100 hari akan bisa terwujud. Seperti yang dikatakan oleh Budi Setiyono (2007;14), bahwa untuk menjalankan sektor manajemen pemerintahan, dibutuhkan dukungan mayoritas dari rakyatnya. Dukungan ini akan menumbuhkan rasa memiliki dari rakyat terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
2. Adanya modal awal yang bagus, yaitu berupa Sumber Daya Alam (SDA) yang masih melimpah dan infrastruktur yang sudah ada. SDA yang melimpah, harus diakui menjadi modal awal yang sangat baik. Karena dengan modal awal ini, biaya yang dikeluarkan jauh lebih murah. Misalnya tentang program pengelolaan lingkungan hidup; beberapa waktu yang lalu sangat banyak pihak yang sudah menerapkan program menanam sejuta pohon. Sehingga sampai hari ini sudah berjuta-juta pohon yang tumbuh dan berkembang. Modal ini akan memperingan langkah dalam mengelola lingkungan hidup, khususnya penanganan polusi udara. Selain itu, infrastruktur-infrastruktur yang sudah tersedia selama ini yaitu berupa jalan-jalan dan jembatan di wilayah-wilayah terpencil, sangat membantu dalam pencapaian target pembangunan bagi rakyat terpencil tersebut.
3. Adanya masyarakat yang sudah semakin cerdas, sehingga bisa dimanfaatkan untuk mengawal dan mengawasi proses pembangunan (mewujudkan program kerja yang sudah disusun). Akuntabilitas birokrasi publik, menurut Wahyudi Kumorotomo (2005;3-4), adalah ukuran untuk mengetahui apakah pelayanan yang diberikan organisasi birokrasi publik sudah sesuai norma/nilai

yang berlaku atau belum. Untuk menerapkan akuntabilitas ini, dibutuhkan pihak-pihak yang bersedia melakukan pengawasan dan melaporkannya kepada pemerintah jika terjadi penyelewengan. Kita sudah punya masyarakat/kelompok masyarakat yang semakin cerdas yang mampu mengawal dan mengawasi proses pembangunan (mewujudkan program kerja yang sudah disusun). Misalnya, untuk memberantas mafia hukum, sudah terbukti kecerdasan masyarakat tentang tuntutan pengusutan secara tuntas atas kasus mafia hukum yang melibatkan aparat penegak hukum, menjadi langkah awal yang sangat baik.

4. Posisi presiden SBY yang diterima secara positif di dunia internasional, menjadi modal untuk meraih simpati dari negara-negara donatur terhadap persoalan-persoalan pembangunan yang ada di Indonesia. Dengan modal kepercayaan internasional ini maka program untuk menyertakan pendanaan di luar APBN dan APBD sangat mudah untuk diperoleh dengan jaminan komitmen pejabat dan pemimpin serta tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik. Misalnya tentang program pemberantasan terorisme yang tentunya harus melibatkan negara-negara lain karena sifat jaringan terorisme yang lintas negara. Meskipun demikian harus diperhitungkan juga kemampuan negara Indonesia untuk mengembalikan dana-dana pinjaman dan harus mampu mengelola secara benar, dana-dana hibah yang sudah diberikan oleh negara-negara donatur tersebut.

Hambatan-hambatan yang harus dihadapi

Meskipun punya banyak dukungan untuk mendukung diwujudkannya program-program kerja yang telah disusun, tetapi hambatan sudah muncul di depan mata. Hambatan-hambatan yang menghadang itu adalah antara lain:

- 1) Meskipun didukung oleh 60% lebih, tetapi ada 30% lebih rakyat Indonesia yang tidak mendukung kepemimpinan SBY-Boediono. Dengan jumlah 30% lebih rakyat Indonesia yang tidak memilih pasangan SBY-Boediono, maka jumlah itu tetap harus diwaspadai. Mereka tidak boleh dikecewakan dan harus dirangkul/diakomodasi tuntutannya. Karena jika mereka kecewa sedikit saja, maka perlawanan dan pemberontakanlah yang akan muncul. Kondisi ini akan memperlambat proses pembangunan karena seluruh energi akan habis untuk mengurus perlawanan/pemberontakan ini.
- 2) Masyarakat yang semakin cerdas juga menjadi hambatan karena pemerintah sudah tidak bisa merekayasa kejadian atau membohongi rakyat lagi. Meskipun meningkatnya kecerdasan rakyat menjadi dukungan, tetapi ternyata bisa juga menjadi hambatan. Karena birokrasi yang selama ini sudah dikenal dengan kebiasaannya untuk merekayasa suatu kejadian atau menganggap masyarakat itu masih bodoh sehingga mudah dikibuli, maka sekarang ini pemerintahan SBY beserta jajarannya harus mewaspadai akan perubahan ini. Adanya tuntutan dari rakyat agar pemerintah bisa jujur dan terbuka, harus bisa diakomodir sedikit demi sedikit. Misalnya, masyarakat sudah tahu tentang rekayasa hukum di balik penahanan pejabat KPK, Bibit-Chandra.
- 3) Adanya konsep yang sudah mendarah daging bagi struktur organisasi pemerintah yaitu "Asal Bapak Senang (ABS)". Seperti juga uraian di atas, bawahan yang senantiasa menerapkan slogan ABS, harus diberantas. Sekarang adalah masa dimana rakyat sudah pintar, sehingga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Selain itu juga lebih berani untuk menuntut hak-haknya yang belum dipenuhi oleh negara. Sistem ABS hanya akan membohongi atasan, sekaligus rakyat kecil, karena atasan mendapat laporan "semua baik-baik saja", padahal di bawah kondisinya semrawut atau amburadul. Dan masyarakat sudah sangat paham dengan kondisi yang seperti ini.
- 4) Adanya korupsi di segala lini birokrasi. Janji presiden SBY untuk memberantas korupsi, merupakan momen penting yang harus didukung oleh semua lapisan birokrasi, juga masyarakat. Tetapi dengan adanya kasus kriminalisasi KPK dengan penahanan Bibit-Chandra dan kasus Bank Century, menunjukkan bahwa korupsi sudah masuk ke semua lini birokrasi. Dari bawahan sampai atasan, semua melakukan korupsi. Apalagi kedua kasus itu melibatkan dua institusi hukum/peradilan yaitu kepolisian dan kejaksaan agung. Sehingga upaya untuk memberantas korupsi harus dilakukan secara maraton dan menyeluruh, dari tingkatan paling bawah sampai tingkatan paling atas. Reformasi birokrasi menurut Agus Dwiyanto

(2006:257), harus dilakukan baik melalui struktur maupun budayanya. Struktur akan lebih mudah direformasikan dibandingkan dengan kultur birokrasinya. Sehingga, sekali lagi, butuh dukungan nyata dari seluruh elemen masyarakat baik pemerintah sendiri, masyarakat, LSM, DPR, dan sebagainya.

PENUTUP

Meskipun susunan Kabinet Indonesia Bersatu II masih menimbulkan pro dan kontra, tetapi program kerja 100 hari kepemimpinan Presiden SBY sudah mulai dilaksanakan dan jika dicermati sudah tersusun secara konkrit. Selanjutnya dibutuhkan upaya-upaya nyata untuk mewujudkannya. Bukan pekerjaan mudah. Karena langkah untuk mewujudkan program-program itu disertai dengan dukungan yang berupa : 1) Pemerintahan SBY-Boediono didukung oleh 60% lebih rakyat Indonesia; 2) punya modal awal yang bagus, yaitu SDA yang masih melimpah dan infrastruktur yang sudah ada; 3) punya masyarakat yang sudah semakin cerdas, sehingga bisa dimanfaatkan untuk mengawal dan mengawasi proses pembangunan, dan juga hambatan yang berupa : 1) meskipun didukung oleh 60% lebih, tetapi ada 30% lebih rakyat Indonesia yang tidak mendukung kepemimpinan SBY-Boediono; 2) masyarakat yang semakin cerdas mungkin dapat menjadi hambatan karena pemerintah sudah tidak bisa merekayasa kejadian atau membodohi rakyat lagi; 3) adanya konsep yang sudah mendarah

daging bagi struktur organisasi pemerintah yaitu "Asal Bapak Senang (ABS)"; dan 4) adanya korupsi di segala lini. Terakhir, dibutuhkan kerja keras, komitmen dan perjuangan yang tanpa henti dan tanpa syarat agar seluruh program pilihan ini benar-benar terwujud dan berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Dwiyanto, Agus, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta, Penerbit Gadjah Mada University Press; 2006

Kumorotomo, Wahyu, *Akuntabilitas Birokrasi Publik : Sketsa Pada Masa Transisi*. Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar; 2005

Setiyono, Budi, *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik*. Jakarta, Penerbit Kalam Nusantara; 2007.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga. Jakarta, Penerbit Balai Pustaka Departemen Pendidikan Nasional; 2005

Media Internet :

<http://www.suarapembaruan.com/News/2009/10/17/index.html>

<http://www.media-indonesia.com>